

KIM

Pencopotan Kepsek Diduga atas Perintah Kejaksaan, Hj. Murni Mengaku Hanya Miskomunikasi

Syamsir, HR - JENEPONTO.KIM.WEB.ID

Feb 22, 2022 - 14:06



JENEPONTO, SULSEL- Pencopotan oknum Kepala Sekolah SD 12 Turatea, Kecamatan Turatea, Hj. Murni pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto melayangkan klarifikasi atas pernyataannya di media yang tayang pada Senin, 21 Februari 2022.

Diberitakan sebelumnya dengan judul, Kadis Pendidikan Jeneponto Diduga Copot Oknum Kepsek atas Perintah Kejaksaan.

Pencopotan Kadis Pendidikan Jeneponto terhadap oknum Kepsek tersebut diduga atas perintah Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto.

Pernyataan tersebut,, Kepsek 12 Turatea, Hj. Murni mengaku bahwa itu hanya miskomunikasi yang terbangun antara Kadis Pendidikan Jeneponto.

"Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi Kejaksaan Negeri Jeneponto yang telah mengatasnakan bahwa pencopotanku atas perintah kejaksaan," ucap Murni diakuinya.

Di mana, Pernyataan Kepala Dinas Jeneponto yang mencopot Kepsek menjadi guru bantu diduga atas perintah kejaksaan. Murni mengaku bahwa itu tidak benar.

" Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas pernyataan itu. Saya benar-benar merasa keliru dan itu tidak benar," jelas Murni kepada media, Selasa (22/2/2022).

Hj Murni menjelaskan, pada saat itu ia terbebani terhadap beberapa persoalan internal yang dihadapi di sekolahnya, ditambah lagi kabar pencopotan dirinya selaku kepala sekolah.

"Begini pak pada saat itu saya ketemu Kepala Dinas Pendidikan bersama Korwilku Copi Morning di ruang pola Kantor Bupati Jeneponto. Dan saya ketemu bertiga di salah satu ruangan khusus membahas masalah pencopotanku menjadi guru bantu," katanya.

"Jadi begini Bu Haji saya selaku orang tua, Ibu Haji selaku anak dan pak Korwil selaku orang tua bahwasyahnya kita dikasih turun menjadi guru bantu," kata dia lagi menirukan Kadis Pendidikan.

Pada saat itu juga, Kadis Pendidikan mendapat informasi terkait adanya laporan Hj Murni yang masuk di Kejaksaan, sehingga turur Hj. Murni ke Kejaksaan Negeri Jeneponto mempertanyakan laporannya itu.

"Jadi disitulah awalnya terjadi miskomunikasi antara saya dengan pak kadis. Saya disuru mempertanyakan laporanku d Kejaksaan ternyata pihak kejaksaan bilang tidak ada" jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jeneponto Susanto juga membantah istansinya ikut campur dalam urusan pencopotan salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

Menurut Kajari Jeneponto, pemberitaan tersebut tidak benar, karena Kajari tidak memiliki kewenangan ikut campur dalam urusan mutasi atau promosi di lingkup Pemda.

"Ini tidak benar, tidak pernah saya pribadi maupun institusi ikut campur untuk urusan mutasi atau promosi di Pemda, karena tidak ada kewenangan kami," bantah Kajari Jeneponto sesaat lalu.

Ia-pun berharap agar pemberitaan tersebut segera diperbaiki sehingga tidak menimbulkan hal negatif di kalangan masyarakat.

Jangan sampai hal ini dianggap sebagai perlawanan dari pihak pihak yang merasa tidak senang dengan beberapa penyidikan perkara yang sedang ditangani sekarang ini, khususnya yang ada di Dinas Pendidikan, tandasnya.

Penulis: Syamsir

Editor: Cq